

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan masyarakat memiliki peran penting dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dialami sebelum diterapkan pada publik, salah satunya dilakukannya manajemen isu. Manajemen isu dilakukan sebagai tindakan keputusan yang berupa strategi yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah yang bersifat isu negatif yang melanda instansi. Manajemen isu merupakan tindakan yang dapat menghindarkan suatu krisis bagi instansi. Sangat penting bagi hubungan masyarakat untuk harus merespon isu supaya tidak berkembang menjadi krisis. Artinya, semakin cepat isu meredam, maka instansi akan terbebas dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat. Jika isu tidak direspon dengan cepat dan tepat, dikhawatirkan isu tersebut dapat berkembang menjadi krisis dan menjadi ancaman yang lebih berbahaya bagi instansi.

Direktorat Jenderal Pajak menghadapi isu yang tentang optimalisasi pendapatan negara yang berdampak pada perekonomian, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Salah satu isu yang dihadapi Direktorat P2Humas adalah masyarakat merasa keberatan dengan aturan baru pajak tahun 2022 mengenai kenaikan tarif PPN menjadi sebelas persen (11%) pada saat

pandemi. Kenaikan tarif PPN dianggap berisiko tinggi menyebabkan inflasi. Kenaikan PPN sebenarnya tidak terlalu signifikan yang semula tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen). Namun, beredar isu-isu negatif yang dikhawatirkan naiknya harga barang dan jasa yang membuat daya beli masyarakat menjadi berkurang. Kenaikan tarif PPN dinilai tidak tepat pada situasi pandemi covid-19 karena perekonomian masyarakat belum pulih seutuhnya. Hal tersebut membuat masyarakat melakukan demonstrasi penolakan kenaikan tarif PPN. Demonstrasi dilakukan masyarakat pada bulan april tahun 2022.



Gambar 1. 1 Demo yang dilakukan oleh KMHDI dan Cipayung Plus

Dikutip dari podiumnews.com, bahwa KMHDI dan Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi yang menuntut lima hal kepada DPRD Kota Metro, salah satu

dari tuntutan mereka adalah untuk menolak kenaikan tarif PPN menjadi sebelas persen (11%).



Gambar 2. 2 Demo yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB)

Dikutip dari himmahonline.id, selaku humas dari ARB mengungkapkan bahwa kita tahu sendiri pasca pandemi Covid-19 ada penurunan dalam kegiatan ekonomi, sehingga kita juga merasa kalau ini PPN tidak *fair* kalau dinaikkan, pun kalau harus dinaikkan tidak saat ini.

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tolak ukur penerimaan atau pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa tantangan terutama dengan optimalisasi pendapatan negara yang

berdampak pada perekonomian, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Meski tidak sedikit pihak yang keberatan dengan keputusan Pemerintah menaikkan tarif PPN di masa pandemi Covid-19, hal itu tetap menjadi pertimbangan bagi perekonomian nasional. Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat pro dan kontra terkait kenaikan tarif PPN yang diberlakukan pada 1 April 2022. Hal tersebut membuat aturan baru pajak tahun 2022 khususnya pada kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi sebelas persen (11%), menjadi suatu isu yang ramai dibicarakan oleh semua kalangan masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun pelaku usaha yang dikhawatirkan dapat menurunkan daya beli masyarakat karena nilai barang yang bertambah.

Dikutip dari iNews.id, Ekonom Indef Bhima Yudistira mengaku tidak setuju tarif PPN dinaikkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, masih banyak opsi lain untuk menaikkan penerimaan negara, salah satunya lewat evaluasi belanja pajak khususnya yang diberikan ke korporasi, hingga pajak lebih besar terhadap harta kekayaan kelompok 20 persen pengeluaran paling atas. Tidak hanya itu, iNews.id memaparkan dampak buruk dari kenaikan tarif PPN menjadi sebelas persen (11%) menjadi enam poin antara lain, memicu harga barang naik ditengah pemulihan ekonomi, akan memukul daya beli masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah, inflasi tercipta karena PPN mempengaruhi harga akhir di tangan konsumen, turunnya daya beli masyarakat karena naiknya harga

bisa menyebabkan merosotnya omzet di sektor ritel, sektor ritel berpotensi gulung tikar karena berkaitan dengan sektor lain seperti logistik, pertanian hingga industri manufaktur, dan yang terakhir berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja akibat dari kebijakan penyesuaian PPN.

Beberapa media lainnya juga memberitakan hal yang sama, seperti yang dikutip dari digstraksi.com, bahwa masyarakat yang kontra terhadap kebijakan kenaikan PPN 11% menilai bahwa kebijakan tersebut lebih banyak memunculkan dampak negatif bagi masyarakat, salah satunya dapat memicu lonjakan harga bahan-bahan pokok; Dikutip dari hukumonline.com, bahwa dikhawatirkan semakin memberatkan pemulihan perdagangan dalam negeri dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Kenaikan PPN juga dinilai akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat sehingga mengakibatkan sektor barang dan jasa turun dan berdampak pada penjualan. Saat produktivitas menurun, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya penyerapan tenaga kerja yang akan membuat pendapatan dan konsumsi masyarakat akan menurun; Dikutip dari kompasiana.com, bahwa kenaikan tarif PPN yang hanya satu persen tidak bisa dianggap remeh oleh masyarakat karena dianggap akan menyebabkan inflasi. Inflasi nantinya akan membuat ekonomi Indonesia semakin tidak tertata.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat penelitian terdahulu terkait penelitian ini yang berjudul “Manajemen Isu Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam Merespon Aturan Baru Pajak Tahun 2022”, yaitu:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode	Hasil Penelitian
1	Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di Tahun 2022 (Michael Candra Gunawan, Michael Chandra. Galang Nusantara Achmad, Maya Rafika, 2022).	Kualitatif	Dalam mensukseskan upaya mengkomunikasikan kenaikan tarif PPN secara masif, maka perencanaan terlebih dahulu perlu menyeragamkan maksud dan tujuan alasan peningkatan tarif PPN di tubuh internal DJP.
2	Strategi Komunikasi Manajemen Isu Publik Pemerintah	Kualitatif	Upaya terstruktur dan terencana untuk mengelola informasi agar sesuai dengan sebuah perspektif tertentu kepada publik

	Provinsi Jawa Timur (Achmad Riski Yulianto, 2019)		lewat media, maka pemantauan media adalah alat untuk mengukur sejauh mana keberhasilan manajemen isu tersebut.
3	Strategi Manajemen Isu Humas PT Angkasa Pura 1 Dalam Menangani Pemberitaan Negative (Riyan Adhi Nugroho, 2021).	Kualitatif	Isu sebagai rumor yang terkadang melanggar hukum dan fakta. Ia akan merespon dan mengakui keberadaan isu tersebut apabila telah ada “konfirmasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen Isu Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam merespons masyarakat yang keberatan dengan kenaikan tarif PPN menjadi sebelas persen (11%) agar tidak berkembang menjadi krisis?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi data, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki para pegawai Direktorat P2Humas DJP serta mengetahui manajemen isu yang dilakukan oleh Direktorat P2Humas, dalam merespons isu yang mendapat banyak isu negatif dari masyarakat terkait kenaikan tarif PPN menjadi sebelas persen (11%).

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi khususnya teori dan metodologi yang mencakup konteks manajemen isu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menilai pihak Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak terutama pada aturan baru pajak tahun 2022.

3. Manfaat Sosial

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan kesan yang positif dengan segala upaya strategi Direktorat Jenderal Pajak yang berupaya menuju sistem perpajakan yang adil dan efektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, peneliti akan membagi penelitian menjadi lima bab yang tersusun secara sistematis untuk mempermudah proses pengerjaan penelitian dan pemahaman pembaca dengan bab beserta sub bab di dalamnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang memberikan gambaran umum dan fakta-fakta yang terjadi dan merupakan masalah yang akan diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan gambaran luas dan alur pemikiran tentang penelitian; Rumusan Masalah yang berisi pokok permasalahan yang dirumuskan untuk ditemukan jawabannya; Tujuan Penelitian yang berisi tentang tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini; Manfaat Penelitian yang menjelaskan tentang manfaat teoritis maupun praktis yang akan didapatkan setelah penelitian ini diselesaikan; serta yang terakhir adalah Sistematika Penulisan yang mendeskripsikan pokok-pokok dari setiap bab dan sub bab dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi rangkuman dari literatur-literatur peneliti terdahulu yang sudah pernah dilakukan yang

berkaitan dan berhubungan dengan penelitian “Strategi Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak dalam Merespon Isu Terkait Aturan Baru Pajak Tahun 2022” ini. Bab ini terdiri atas Landasan Teori; Kerangka Teoritis yang berisikan teori-teori dan konsep yang akan digunakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian; serta Kerangka Berpikir yang merupakan ringkasan dari alur pemikiran yang dibangun untuk memperoleh jawaban penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri atas Paradigma Penelitian, Jenis Pendekatan, Metode Penelitian, Metode Pengambilan Informan, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Interpretasi Data, serta Keabsahan Data.

BAB IV Pembahasan

Bab ini terdiri atas gambaran umum informan yang telah dipilih oleh peneliti, selain itu penyajian data yang dijelaskan dari analisis data yang didapat peneliti, kemudian interpretasi hasil data secara teoritis, dan terakhir diskusi mengenai pokok-pokok temuan penelitian sehingga

didapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir, penelitian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pokok-pokok analisis dan interpretasi data yang menjawab permasalahan dalam penelitian. Sedangkan ada tiga jenis saran yaitu saran akademis, saran praktis, dan saran sosial.

